

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

KPU Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat yang berkewajiban menyampaikan Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan KPU Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPU Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bengkayang, 1 Februari 2022

Sekretaris,



INDRA YATI, S.H.

NIP. 19850313 200902 2 003

DAFTAR ISI

TAR ISI

Kata Pengantar	x
Daftar Isi	x
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Ringkasan	x
I. Laporan Realisasi Anggaran	x
II. Neraca	x
III. Laporan Operasional	x
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	x
V. Catatan atas Laporan Keuangan	x
A. Penjelasan Umum	x
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	x
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	x
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	x
F. Pengungkapan Penting Lainnya	x
VI. Lampiran dan Daftar	x

KPU KABUPATEN BENGKAYANG
JALAN GUNA BARU TRANS RANGKANG - BENGKAYANG
TELEPON (0562) 4442069, FAXIMILE (0562) 4442069

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan KPU Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bengkayang, 1 Februari 2022

Sekretaris,



INDRA YATI, S.H.

NIP 19850313 200902 2 003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan KPU Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 66,050,000,-. Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp. 5,461,000,262,- atau mencapai 49 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 11,157,938,000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 1.275,983,156,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 720,000,- Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 1,275,263,156,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 1,275,983,156,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 0,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 5,375.581.471,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 5,375.581.471,- Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dan

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya masing-masing sebesar Rp. 66,050,000,- dan sebesar (Rp. 245,816,694,-) sehingga total jumlah defisit dari kegiatan non operasional adalah Rp. 179,766,694,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. 5,555.348.165,-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp. 2.373.824.855,- dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp. 5,555.348.165,-) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. (Rp. 5.986.218.570,-) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 2,035,233,662,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp. 1,275,983,156,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KPU KABUPATEN BENGKAYANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2021		% thd Angg	TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	66,050,000	0.00	288,417
JUMLAH PENDAPATAN		-	66,050,000	0.00	288,417
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	1,496,896,000	1,461,122,060	97.61	1,480,150,245
Belanja Barang	B.4	9,580,903,000	3,999,878,202	41.75	24,015,125,450
Belanja Modal	B.5	80,139,000	-	0.00	12,360,750
JUMLAH BELANJA		11,157,938,000	5,461,000,262	48.94	25,507,636,445

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KPU KABUPATEN BENGKAYANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.0	-	9,013,455,950
Persediaan	C.1	720,000	245,866,694
Jumlah Aset Lancar		720,000	9,259,322,644
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.2	2,207,651,922	2,348,217,422
Gedung dan Bangunan	C.3	843,109,000	843,109,000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.4	(1,775,497,766)	(1,668,332,248)
Jumlah Aset Tetap		1,275,263,156	1,522,994,174
ASET LAINNYA			
Aset Lain-Lain	C.5	140,565,500	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.6	(140,565,500)	-
Jumlah Aset Lainnya		0	-
JUMLAH ASET		1,275,983,156	10,782,316,818
EKUITAS			
Ekuitas	C.7	1,275,983,156	10,782,316,818
JUMLAH EKUITAS		1,275,983,156	10,782,316,818
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1,275,983,156	10,782,316,818

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KPU KABUPATEN BENGKAYANG

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1		105,145,863
JUMLAH PENDAPATAN		-	105,145,863
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	1,461,122,060	1,480,150,245
Beban Persediaan	D.3	27,092,650	425,002,384
Beban Barang dan Jasa	D.4	3,284,584,086	22,139,104,075
Beban Pemeliharaan	D.5	143,010,104	54,742,958
Beban Perjalanan Dinas	D.6	234,462,173	1,414,342,700
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	225,310,398	232,552,630
JUMLAH BEBAN		5,375,581,471	25,745,894,992
OPERASIONAL		(5,375,581,471)	(25,640,749,129)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			28,841,700
Lainnya		66,050,000	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		245,816,694	
OPERASIONAL		(179,766,694)	28,841,700
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(5,555,348,165)	(25,611,907,429)
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(5,555,348,165)	(25,611,907,429)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KPU KABUPATEN BENGKAYANG

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	E.1	10,782,316,818	2,373,824,855
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(5,555,348,165)	(25,611,907,429)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(5,986,208,570)	24,111,560
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3	(22,420,620)	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	(5,963,787,950)	24,111,560
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		2,035,233,073	33,996,287,832
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.4	(9,506,333,662)	8,408,491,963
EKUITAS AKHIR	E.5	1,275,983,156	10,782,316,818

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Pemilihan Umum

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Bengkayang mempunyai tugas dan wewenang dalam setiap tahapan Pemilu yaitu :

1. Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

- Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
- Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU Kabupaten/Kota;

Adapun Visi KPU Kab. Bengkayang ialah merwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Misi KPU Kab. Bengkayang ialah :

- Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum

- Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPU Kabupaten Bengkayang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan

SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

KPU Kabupaten Bengkayang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan KPU Kabupaten Bengkayang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari KPU Kabupaten Bengkayang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPU Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 Tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas	20

Tanaman Semusim.	
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh

tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *KPU Kabupaten Bengkayang* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan belanja pegawai dan memasukan anggaran hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 kedalam DIPA TA 2021 Perubahan tersebut berdasarkan jenis belanja antara lain:

Uraian	2021	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Belanja		
Belanja Pegawai	Rp 1,798,063,000	Rp 1,496,896,000
Belanja Barang	684,243,000	9,580,903,000
Belanja Modal	0	80,139,000
Jumlah Belanja	2,482,306,000	11,157,938,000

Realisasi

*Pendapatan Rp
66.050.000,-*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 66.050.000,-. dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Penerimaan Negara Bukan Pajak		66,050,000	-
Jumlah	-	66,050,000	-

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2021 mengalami Penurunan dibandingkan TA 2020. Rincian Realisasi Pendapatan *terlampir*.
Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Negara Bukan Pajak	66,050,000	28,987,563	0.00
Pendapatan Jasa Giro	-	145,863	
Pendapatan Dari Sisa Dana Kampanye	-	105,000,000	
Jumlah	66,050,000	134,133,426	0.00

Realisasi pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 66.050.000,- dari tahun 2021 adalah pengembalian kelebihan honor kelompok kerja dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkayang Tahun 2020

Realisasi Belanja Negara Rp. 5,461,000,262,-

B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp. 5,462,000,282,- atau 48,94 persen dari anggaran belanja sebesar Rp. 11,157,938,000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2021

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	1,496,896,000	1,461,122,060	97.61
Belanja Barang	9,580,903,000	3,999,878,202	41.75
Belanja Modal	80,139,000	-	-
Total Belanja Kotor	11,157,938,000	5,461,000,262	48.94
Pengembalian		-	-
Jumlah	11,157,938,000	5,461,000,262	48.94

Dibandingkan dengan TA 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami Penurunan sebesar (78,59%) dibandingkan realisasi

belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 di KPU Kabupaten Bengkayang mengadakan Pemilihan Kepala Daerah jadi Pagu Anggaran pada tahun 2020 lebih banyak dari Pagu Anggaran Tahun 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1,461,122,060	1,480,150,245	(1.29)
Belanja Barang	3,999,878,202	24,015,125,450	(83.34)
Belanja Modal	-	12,360,750	(100.00)
Jumlah	5,461,000,262	25,507,636,445	(78.59)

Belanja Pegawai
Rp.
1,461,122,060,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 1,461,122,060,- dan Rp. 1,480,150,245,- Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar 1,29% dari TA 2020.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	392,412,909	377,922,665	3.83
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	1,068,709,151	1,102,227,580	(3.04)
Jumlah Belanja Kotor	1,461,122,060	1,480,150,245	(1.29)
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	1,461,122,060	1,480,150,245	(1.29)

Belanja Barang
Rp.
3,999,878,202,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 3,999,878,202,-. dan Rp. 24,015,125,450,-. Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami penurunan 83,34% dari Realisasi Belanja Barang TA 2020.

Perbandingan Belanja Barang TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2010	NAIK (TURUN) %
Belanja Keperluan Perkantoran	207,305,000	205,483,620	0.89
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	99,000	-	-
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	67,619,996	127,280,000	(46.87)
Belanja Barang Operasional Lainnya	11,792,000	15,283,000	(22.84)
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	20,604,006	3,796,142,950	(99.46)
Belanja Bahan	403,288,700	3,600,841,254	(88.80)
Belanja Honor Output Kegiatan	2,246,800,000	11,998,050,000	(81.27)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	74,962,000	421,768,948	(82.23)
Belanja Barang Non Operasional -Penanganan Pandemi Covid-19	2,979,000	-	100.00
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	337,821,839	15,085,814	2,139.33
Belanja Langganan Listik	8,892,784	48,332,708	(81.60)
Belanja Langganan Telepon	-	11,929,500	(100.00)
Belanja Langganan Air	1,861,600	11,350,000	(83.60)
Belanja Sewa	28,060,000	213,269,000	(86.84)
Belanja Jasa Profesi	-	-	-
Belanja Jasa Lainnya	208,920,000	1,086,261,998	(80.77)
Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19	1,400,000	994,961,000	(99.86)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	56,094,000	3,182,908	1,662.35
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	86,916,104	51,560,050	68.57
Belanja Perjalanan Biasa	234,462,173	1,412,622,700	(83.40)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	1,720,000	(100.00)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	3,999,878,202	24,015,125,450	(83.34)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	3,999,878,202	24,015,125,450	(83.34)

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp. 0,-

Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp 12.360.750,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2021 mengalami penurunan sebanyak 100% dibandingkan TA 2020.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	12,360,750	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	12,360,750	0.00
Pengembalian	-	-	0.00
Jumlah Belanja	0	12,360,750	(100.00)

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 adalah sebesar Rp 0,- mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	12,360,750	-
Jumlah Belanja Kotor	-	12,360,750	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	12,360,750	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

<i>Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 0,-</i>	C.0 Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo kad di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2021 dan tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara Per Tanggal Neraca.
<i>Kas Lainnya Setara Kas Rp 0,-</i>	C.1 Kas Lainnya dan Setara Kas Saldo Kas lainnya setara kas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 9,013,455,950. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari TUP/UP, kas lainnya dan Setara Kas. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.
<i>Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Rp. 0,-</i>	C.2 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- . Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.
<i>Persediaan Rp 720.000,-</i>	C.3 Persediaan Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 720.000,- dan Rpp 245,866,694,- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan

operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2021 dan 2020

Jenis	TH 2021	TH 2020
Barang Konsumsi	720,000	50,000
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Barang Persediaan lainnya	-	245,816,694
Barang untuk di serahkan	-	-
Jumlah	720,000	245,866,694

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Peralatan dan
Mesin Rp.
2,207,651,922,-*

C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah Rp 2,207,651,922,- dan Rp 2,340,356,672,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	2,348,217,422
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	140,565,500
Saldo per 31 Desember 2021	2,207,651,922
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	1,678,215,956
Nilai Buku per 31 Desember 2021	529,435,966

Mutasi Transaksi kurang peralatan dan mesin berupa penghentian penggunaan kendaraan minibus dan sepeda motor yang sudah tidak layak lagi untuk digunakan dalam operasional kantor.

*Gedung dan
Bangunan
Rp 843,109,000,-*

C.5 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp 843,109,000 dan Rp 843,109,000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	843,109,000
Mutasi tambah: pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2021	843,109,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	97,281,810
Nilai Buku per 31 Desember 2021	745,827,190

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi Rp 0*

C.6 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	0
Mutasi tambah: Penambahan jaringan teknologi informasi	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2021	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	0
Nilai Buku per 31 Desember 2021	0

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp.
(1,775,497,766,-)*

C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp (1,775,497,766,-) dan Rp (1,668,332,248,-) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap

yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
TA 2021 dan 2020*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2,207,651,922	1,678,215,956	529,435,966
2	Gedung dan Bangunan	843,109,000	97,281,810	745,827,190
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		3,050,760,922	1,775,497,766	1,275,263,156

Rincian peyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 disajikan dalam Lampiran Rincian Penyusutan Aset Tetap yang merupakan bagian dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

*Aset Lain-Lain Rp
(140,565,500,-)*

C.8 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah (Rp.140,565,500,-) dan Rp 0,-. Aset lain lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas, Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	140,565,500
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari aset tetap	140,565,500
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2021	140,565,500
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(140,565,500)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	0

<i>Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya(Rp 140,565,500-)</i>	C.9 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing (Rp 140,565,500,-) dan Rp 0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat asset lainnya.
<i>Utang kepada pihak ketiga KPPN Rp. 0</i>	C.10 Utang Kepada Pihak Ketiga Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan sebesar Rp. 0,-.
<i>Uang muka dari KPPN Rp. 0,-</i>	C.11 Uang Muka dari KPPN Uang muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-.
<i>Ekuitas Rp. 1,275,983,156,-</i>	C.12 Ekuitas Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 1,275,983,156,- dan Rp 10,782,316,818,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
	D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
<i>Pendapatan PNBPN Rp. 0,-</i>	D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp. 105.145.863,- Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2021 dan 2020

URAIAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	105,145,863	(100)
Jumlah	0	105,145,863	(100)

Beban Pegawai
Rp
1.461.122.060,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.461.122.060,- dan Rp. 1.480.150.245,- Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2021 dan 2020

URAIAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji, Tunjangan	1,461,122,060	1,480,150,245	0.99
Jumlah	1,461,122,060	1,480,150,245	0.99

Beban
Persediaan Rp
337.821.839,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 337.821.839,- dan Rp.15.085.814,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2021 dan 2020

URAIAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	337,821,839	15,085,814	4.47
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	0.00
Jumlah	337,821,839	15,085,814	173.08%

Beban Barang dan Jasa Rp 3.594.643.275,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.594.643.275,- dan Rp. 22.139.104.075 ,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2010	NAIK (TURUN) %
Belanja Keperluan Perkantoran	207,305,000.00	205,483,620.00	0.89
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	99,000.00	-	-
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	67,619,996.00	127,280,000.00	(46.87)
Belanja Barang Operasional Lainnya	11,792,000.00	15,283,000.00	(22.84)
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	20,604,006.00	3,796,142,950.00	(99.46)
Belanja Bahan	403,288,700.00	3,600,841,254.00	(88.80)
Belanja Honor Output Kegiatan	2,246,800,000.00	11,998,050,000.00	(81.27)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	74,962,000.00	421,768,948.00	(82.23)
Belanja Barang Non Operasional -Penanganan Pandemi Covid-19	2,979,000.00	-	100.00
Belanja Langganan Listik	8,892,784.00	48,332,708.00	(81.60)
Belanja Langganan Telepon	-	11,929,500.00	(100.00)
Belanja Langganan Air	1,861,600.00	11,350,000.00	(83.60)
Belanja Sewa	28,060,000.00	213,269,000.00	(86.84)
Belanja Jasa Profesi	-	-	-
Belanja Jasa Lainnya	208,920,000.00	1,086,261,998.00	(80.77)
Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19	1,400,000.00	994,961,000.00	(99.86)
Jumlah Belanja Kotor	3,284,584,086.00	22,530,953,978.00	(85.42)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	3,284,584,086.00	22,530,953,978.00	(85.42)

Beban
Pemeliharaan Rp.
143.010.104,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 143.010.104,- dan 54.742.958. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	56,094,000	3,182,908	1,662
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	86,916,104	51,560,050	69
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	-	-
Beban Persediaan suku cadang	-	-	0.00
Jumlah	143,010,104	54,742,958	161.24

Beban Perjalanan
Dinas Rp
234.462.173,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 234.462.173,- dan Rp 1.414.342.700,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
beban perjalanan biasa	234,462,173	1,412,622,700	(83.40)
beban perjalanan dinas dalam kota	0	0	0.00
beban perjalanan dinas paket meeting dalam kota	0	0	0.00
beban perjalanan dinas paket meeting luar kota	0	1,720,000	(100.00)
Jumlah	234,462,173	1,414,342,700	(83.42)

*Beban Barang
untuk diserahkan
kepada
Masyarakat Rp.
0,-*

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat untuk tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai etintas.

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi Rp
225.310.298,-*

D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 225.810.98,- dan Rp. 232.552.630,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut ;

Rincian Beban Penyusutan dan Amortasi

TA 2021 dan 2021

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	203,692,218	210,934,450	(3)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	21,618,180	21,618,180	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaingan	-	-	-
Jumlah Penyusutan	-	1,720,000	(100)
Beban Amortasi	-	-	-
Beban Penyusutan Lain-Lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	225,310,398	234,272,630	(4)

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional (Rp.
179.766.694,-)

D.9 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2021 dan 2020

URAIAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
pendapatan pelepasan aset non lancar	0	28,841,700	-
pendapatan dari kegiatan non operasioanal lainnya	66,050,000	0	-
beban dari kegiatan non operasional lainnya	245,816,694	0	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(179,766,694)	28,841,700	0.00

*) *Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp
10,782,316,818,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 10,782,316,818,- dan Rp 2,373,824,855,-.

Defisit LO
(Rp
5,865,407,354,-)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar (Rp. 5,865,407,354,-) dan (Rp. 25,611,907,429,-) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp 0,-*

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp 0,-*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2022 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Jumlah	0

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp 0*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi Rp
0*

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai

aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2021

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Jumlah	-

Koreksi Atas Reklasifikasi (Rp. 22,420,620,-)

E.3.4 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp (Rp. 22,420,620,-) dan Rp 0.

Transaksi Antar Entitas Rp 2,035,233,073,-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 2,035,233,073,- dan Rp 33,996,287,832,-.

Ekuitas Akhir Rp 1,275,983,156,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 1,275,983,156,- dan Rp 10,782,316,818,-

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian – kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Berdasarkan sk sekretaris kpu kabupaten bengkayang nomor 2/HK.03.2-kpt/6107/2022 tentang penunjukan/ penetapan kuasa pengguna anggaran, pejabat membuat komitmen, pejabat penguji tagihan dan penandatanganan spm, bendahara pengeluaran, dan staf

pengelola keuangan pada komisi pemilihan umum kabupaten bengkayang bagian anggaran 076 tahun anggaran 2022 telah dilakukan perhentian Pejabat Pengelola Keuangan.

Semula :

Kuasa Pengguna Anggaran : Yulius Lay, S.E., M.E.
Pejabat Pembuat Komitmen : Yulius Lay, S.E., M.E.
Pejabat Pembuatan/Penguji SPM : Sisilia Saniah
Bendahara : Zakki Setiawan, S.H.

Menjadi :

Kuasa Pengguna Anggaran : Indra Yati, S.H.
Pejabat Pembuat Komitmen : Indra Yati, S.H.
Pejabat Pembuatan/Penguji SPM : Zakki Setiawan, S.H.
Bendahara : Sisilia Saniah

2. Data rekening

Nama bank : Pt.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. KC
Singkawang Jl. Diponegoro No.23 Singkawang
Nama Rekening : BPG 093 KPU Kabupaten Bengkayang
Nomor Rekening : 651896584401000